

**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Supratman No. 44 Tlp. 7206174 Fax. 7106286  
B a n d u n g 40121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, di Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahunan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen tertulis, seperti Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen-dokumen tersebut ditulis dengan mengacu dan berpedoman kepada landasan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Rencana kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RENJA Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tahun 2016 ini diharapkan memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, RENJA Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat ini merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. RENJA Tahun 2016 memuat penjabaran visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Dengan demikian, RENJA Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016.

Di samping untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, penyusunan RENJA Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini juga dimaksudkan untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perencanaan dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan RENJA Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
17. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor 050/Kep.01-Prog/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dengan baik, sesuai dengan tujuan masing-masing program dan kegiatan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 Provinsi Jawa Barat.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

## **BAB IV    PENUTUP**

Menguraikan    tentang    catatan-catatan    penting,    kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2015**

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan perencanaan kerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat yang mencakup 9 (sembilan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.530.509.750,00 (tujuhbelas milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Secara umum program dan kegiatan tersebut telah berhasil diselenggarakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan ini dapat dilihat berdasarkan pencapaian indikator kinerja setiap kegiatan maupun pencapaian indikator kinerja utama serta berdasarkan persentase penyerapan anggaran.

Namun demikian, pada tahun 2015 terdapat dua kegiatan yang tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana, yaitu kegiatan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol dan Penyusunan Kajian Teknis Raperda Pembinaan Kemandirian Organisasi Masyarakat. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diusulkan dalam APBD 2015 Perubahan. Kegiatan Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol merupakan kegiatan yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak penyedia jasa (konsultan) dengan mekanisme lelang terbuka. Namun karena keterlambatan pengesahan APBD 2015 Perubahan dan keterlambatan penyusunan dokumen lelang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka proses pelelangan kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena pertimbangan keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak mungkin terselesaikan sampai akhir tahun 2015. Selanjutnya kegiatan ini diajukan pada tahun anggaran 2016 bersama-sama dengan kegiatan pelaksanaan pembangunannya.

Dalam proses pembahasan Raperda Pembinaan Kemandirian Organisasi Masyarakat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat mengambil alih penyusunan Raperda tersebut menjadi Raperda inisiatif DPRD.



Dengan demikian, kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Raperda Pembinaan Kemandirian Organisasi Masyarakat tidak menggunakan dana RKA 2015 Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Dari aspek pencapaian indikator kinerja, semua kegiatan pada tahun 2015 telah berhasil mencapai target indikator kinerja output yang ditetapkan, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1. Penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut juga telah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama yang ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, tercantum 9 Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Dari 9 Indikator Kinerja Utama tersebut, 7 indikator kinerja berhasil mencapai target. Sedangkan 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, belum diumumkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu 1 indikator kinerja, yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada, pencapaiannya hanya 85%. Pada tahun 2015, indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 72%, namun pencapaiannya pada Pilkada di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2015 hanya 61%. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan hasil Pilkada, pasangan calon kepala daerah bukan merupakan figur yang diharapkan oleh masyarakat untuk memimpin daerahnya, dan semakin berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinan daerahnya. Faktor-faktor ini harus menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sebagai OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengurus politik dalam negeri. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mengintensifkan dan mengefektifkan program dan kegiatan Pendidikan Politik, khususnya menghadapi Pilkada serentak tahun 2017.

Pada tahun 2015, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 26.946.378.210,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 17.530.509.750,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.415.868.460,00. Penyerapan anggaran tersebut masing-masing adalah Rp. 14.658.944.900,00 atau 83,62% untuk Belanja Langsung dan Rp. 8.927.975.554,00 atau 94,82% untuk Belanja Tidak Langsung. Dengan demikian, total penyerapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 23.586.920.454,00 atau 87,53%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian

penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung termasuk baik.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat secara umum telah menyelenggarakan dengan baik dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam RENJA tahun 2015. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat Tahun 2015 dan Pencapaian RENSTRA Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat s.d Tahun 2015**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S.d Tahun 2016		Catatan
					Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12
	<b>Urusan Wajib</b>										
	<b>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>										
1.19.01.29	<b>Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah</b>	Terselenggaranya perencanaan Bakesbangpol yang komprehensif, sistematis, dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1. Kegiatan Rapat Kerja Bidang Kesbangpol	Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang Kesbangpol se-Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.19.01.53	<b>Pogram Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	
	2. Pembangunan Sistem Informasi Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Eksistensi kelembagaan dan penguatan tupoksi Bakesbangpol melalui sistem informasi yang sistematis dan akurat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	
1.19.01.55	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	Pemantapan semangat kebangsaan	78%	71%	72%	72%	100%	74%	74%	100%	
	3. Pemantapan Idiologi Bangsa	Terwujudnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda			80%	80%	100%	85%	-	-	
	4. Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Barat	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pratai Politik			80%	80%	100%	-	-	-	
	5. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Terwujudnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan masyarakat			85%	85%	100%	87%			
	6. Pemantapan Bela Negara	Terwujudnya rasa cinta tanah air dan			85%	85%	100%	85%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S.d Tahun 2016		Catatan
					Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		semangat kebangsaan generasi muda									
	7. Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan	Terwujudnya rasa toleransi dan harmonis generasi muda lintas agama			85%	85%	100%				
	8. Pendidikan Budaya dan Etika Politik Bagi Pelajar dan Mahasiswa	Terwujudnya karakter etika budaya politik demokrasi madani bagi pelajar dan mahasiswa di Jawa Barat			80%	80%	100%	85%			
	9. Komunikasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Jawa Barat	Tefasilitasinya pendidikan moal komunikasi politik bagi elemen masyarakat			80%	80%	100%	85%			
	10. Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajuan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Hibah Bagi Ormas	Meningkatnya akuntabilitas penyaluran, penggunaan, dan pemanfaatan bantuan hibah bagi Ormas			95%	95%	100%				
	11. Monitoring Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 di Jawa Baat	Terciptanya hasil pemantauan dan pelaporan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang legitimatif			90%	90%	100%				
1.19.01.56	<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	Terwujudnya Jawa Barat yang aman dan kondusif	85%	65%	70%	70%	100%	75%	75%	100%	
	12. Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat	Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif dari dampak negatif keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	100%	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	100%	
	13. Forum Komunikasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik	Meningkatnya peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam menjaga dan memelihara kondusivitas daerah dari potensi terjadinya konflik di masyarakat			80%	80%	100%	85%			
	14. Peningkatan Kualitas Keamanan di Jawa Barat	Meningkatnya sinergitas dalam penanganan permasalahan yang berkembang di daerah			75%	75%	100%	78%			
	15. Pemetaan Situasi dan Kondisi Konflik Sosial di Daeah	Terpetakannya situasi dan kondisi konflik sosial di Jawa Barat			70%	70%	100%	80%			
	16. Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Teciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan di Jawa Barat			80%	80%	100%				
	17. Komunikasi dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	Meningkatnya peran dan fungsi Foun Kerukunan Umat Beragama untuk			70%	70%	100%	80%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S.d Tahun 2016		Catatan
					Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		mencegah konflik antar umat beragama guna menciptakan Jawa Barat yang kondusif									
	18. Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat	Mewujudkan peranan Ormas sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan di Jawa Barat			80%	80%	100%	85%			
	19. Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan SDA di Jawa Baat	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan SDA di Jawa Barat			80%	80%	100%	85%			
1.19.01.59	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur</b>	Tingkat keterampilan aparatur, pofesionalisme dan tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	20. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	Terciptanya manajemen Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi dan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.19.01.60	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung Tupoksi Badan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	21. Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelaksanaan Tupoksi Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.19.01.61	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tingkat sarana dan prasarana operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol Prov Jawa Barat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.19.01.62	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tingkat sarana dan prasarana operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jawa Barat	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bakesbangpol Prov Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.19.01.66	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kineja pada unit SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S.d Tahun 2016		Catatan
					Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	24. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol Prov. Jabar	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	25. Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bansos	Mewujudkan akuntabilitas bantuan hibah kepada Omas			25%	25%	100%	30%	30%	100%	

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja**  
**Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat	100%	100%	100%
2.	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan	100%	100%	100%
3.	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	25	25	100%
4.	Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	18	18	100%
5.	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> konflik terkait kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%
6.	Jumlah Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat	100	100	100%
7.	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	67	NA	
8.	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	72	61	85%
9.	Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat	75	75	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah pelayanan baik pelayanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

### a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan; dan
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

### b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);



- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 9) Fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dapat diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan dalam penetapan kinerja dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 telah ditunjukkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dapat dicapai dengan baik. Namun demikian, upaya-upaya untuk pencapaian tersebut bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang dihadapi pada Tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian dari kendala dan hambatan tersebut telah dapat diatasi, namun beberapa kendala dan hambatan masih membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Beberapa kendala dan hambatan

yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 antara lain adalah:

1. Partisipasi masyarakat pada sejumlah Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 masih tergolong rendah, yaitu 61%. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan masyarakat baik terhadap penyelenggaraan Pilkada maupun terhadap hasil Pilkada.
2. Adanya kecenderungan terjadinya peningkatan faham-faham dan kelompok radikal yang bersifat transnasional. Penyebaran faham dan kelompok radikal tersebut menunjukkan kecenderungan yang semakin intens khususnya melalui teknologi informasi seperti internet.
3. Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkai berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.
4. Masih tingginya konflik dan kekerasan komunal (*conflict and communal violence*) di tengah masyarakat, seperti pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa sepanjang tahun 2015 telah terjadi 96 peristiwa pembatasan dan intoleransi kebebasan beragama di seluruh Indonesia.
5. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas dan imigran gelap. Penyebabnya antara lain adalah perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi yang memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional.
6. Lemahnya sistem pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.

Dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, baik secara lokal, nasional, dan global seperti mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), telah mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat. Pengaruh positif dari perkembangan ini juga diiringi dengan pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam aspek degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya faham serta kelompok radikal. Dalam menghadapi kondisi ini, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dituntut untuk selalu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders*-nya dengan tetap mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mampu mencegah atau mereduksi potensi ancaman tersebut, antara lain seperti :

- Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan sasaran kelompok masyarakat yang berpotensi menyebarkan pendidikan tersebut, sehingga bisa menimbulkan efek bola salju (*snow ball effect*) yang akan menjangkau sasaran yang lebih luas. Kelompok sasaran seperti ini antara lain adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok PKK, dan Karang Taruna.
- Pemberdayaan *local wisdom* seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya dalam upaya mencegah atau mengurangi terjadinya konflik sosial.
- Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi

Selain itu, perkembangan politik dalam negeri selama tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015 memunculkan sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan/ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan pemerintahan yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab bidang Kesbangpol menjadi urusan Pemerintahan Umum yang kewenangannya berada pada Presiden dan akan dilaksanakan oleh Gubernur dan

Bupati/Walikota dengan dibantu oleh instansi vertikal. Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sebagai OPD yang secara langsung berkaitan dengan perubahan ini dituntut untuk menyusun langkah-langkah antisipasi dan persiapan yang dinilai perlu untuk menghadapi perubahan tersebut. Koordinasi dan komunikasi, baik secara vertikal dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri dan Kantor/Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, maupun secara horizontal dengan Setda Provinsi Jawa Barat dan Biro Organisasi Pemprov Jawa Barat perlu dilakukan secara intensif.

Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian telah disetujui oleh DPR pada awal tahun 2015 telah mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada Langsung. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, dalam Perpu tersebut dinyatakan bahwa Pilkada Langsung akan dilakukan secara serentak dengan beberapa perbedaan dalam tahapan pelaksanaannya. Pada tahun 2015, 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menyelenggarakan Pilkada serentak tersebut. Dari penyelenggaraan Pilkada tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Dari delapan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2015, terdapat satu daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Hal ini terjadi karena beberapa Partai Politik tidak mengajukan, mendukung, atau mengusung pasangan calon kepala daerah. Kenyataan ini menjadi suatu ironi, karena dalam sistem demokrasi, Partai Politik seharusnya berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik dalam rangka kaderisasi calon pemimpin publik.

Catatan lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dari delapan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Walaupun belum ada pengumuman secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara Pilkada, namun dari perhitungan sementara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jawa Barat hanya 61% yang berarti jauh di bawah target Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, yaitu 72%, dan lebih rendah dibandingkan dengan persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014, yaitu 70%.

Kedua hal ini menjadi bahan evaluasi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sebagai OPD yang mengurus Politik Dalam Negeri. Evaluasi dan analisis

yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan sehingga Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dapat merumuskan program dan kegiatan bidang Pendidikan Politik untuk mengatasi atau setidaknya mereduksi permasalahan tersebut.

Perkembangan lain adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima beberapa tuntutan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keputusan tersebut akan mempengaruhi pola hubungan Pemerintah dengan Ormas, sehingga akan berpengaruh kepada tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah khususnya Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat yang berkaitan dengan Ormas. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat diharapkan mempelajari dan memahami dengan baik keputusan MK tersebut sehingga kinerja pelayanan kepada Ormas dapat tetap dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam visi dan misi Badan kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pola fasilitasi/pembinaan Ormas yang dilakukan selama ini perlu diarahkan pada pengembangan Ormas-ormas unggulan yang dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang dapat dipercaya.

Dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2013-2018. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didisain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat**

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat diberi alokasi 8 (delapan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Bakesbangpol.
  - 2) Penyusunan Laporan Triwulan Bakesbangpol Jawa Barat.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
  - 2) Pelatihan Sikap Mental
  - 3) Pembinaan Budaya Baca Al – Qur'an dan Keagamaan
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - 1) Pengadaan Bahan Bakar Minyak
  - 2) Pengadaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - 4) Pemeliharaan Peralatan Kantor
  - 5) Pemeliharaan Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - 1) Pejabat Pengadaan dan Adminitrasi
  - 2) Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 5) Penyediaan Jasa Surat Kabar dan Majalah
  - 6) Penyediaan Jasa Repeater Radio/SSB
  - 7) Penyediaan Perjalanan Dinas
6. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan kegiatan :
  - 1) Rencana Aksi Penangan Konflik Sosial di Jawa Barat
  - 2) Deteksi Dini Konflik Sosial di Jawa Barat
  - 3) Pengawasan orang Asing di Wilayah Provinsi Jawa Barat
  - 4) Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika
  - 5) Talkshow Bahaya Penyalahgunaan Narkotika
  - 6) Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya
  - 7) Focus Group Discussion Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat
  - 8) Gelar Siaga Ormas di Jawa Barat
  - 9) Verifikasi Keberadaan Ormas di Jawa Barat
  - 10) Jambore Ormas
  - 11) Forum Komunikasi dan Kerja Sama Antar Umat Beragama
  - 12) Pemetaan Kompetensi Ormas
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
  - 1) Pendidikan Bela Negara
  - 2) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
  - 3) Pemantapan Ideologi Bangsa

- 4) Diseminasi Komunikasi Politik antara Supra dan Infra Politik dengan Komponen Masyarakat di Jawa Barat
  - 5) Penguatan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat
  - 6) Pendidikan Politik Masyarakat
  - 7) Monitoring Aktifitas Politik di Jawa Barat
8. Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan kegiatan :
- 1) Diseminasi Bidang Kesbangpol
  - 2) Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Strategis Kesbangpol se Jawa Barat

Dalam pembahasan selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat, dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD 2017. Program yang sebelumnya berjumlah 8, berubah menjadi 9; sedangkan kegiatan tetap berjumlah 24 kegiatan namun dengan perubahan/pergantian pada beberapa kegiatan. Matriks perbandingan program dan kegiatan yang telah dirancang dalam RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dengan kebutuhan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.3.



**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah</b>		Terselenggaranya perencanaan Bakesbangpol yang komprehensif, sistematis, dan akurat	100%		<b>Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah</b>		Terselenggaranya perencanaan Bakesbangpol yang komprehensif, sistematis, dan akurat	100%	887.430.000	
	1 Penguatan Peran dan Fungsi Forum-forum Mitra Bakesbangpol Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antara Bakesbangpol Prov. Jawa Barat dengan Forum-forum Mitra Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat melalui penyelenggaraan 4 kali Rakor	100%	500.000.000	1 <b>Penguatan Peran dan Fungsi Forum-forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antara Bakesbangpol Prov. Jawa Barat dengan Forum-forum Mitra Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat melalui penyelenggaraan 4 kali Rakor	100%	369.200.000	
	2 Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se-Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang Kesbangpol se-Jawa Barat	100%	700.000.000	2 <b>Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se-Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang Kesbangpol se-Jawa Barat	100%	518.230.000	
2	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu atau Pemilukada	72%		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu atau Pemilukada	72%	4.223.770.000	
	3 Penguatan Pendidikan Politik Bagi Pelajar dan Masyarakat di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya pendidikan politik bagi pelajar, mahasiswa, dan generasi muda di Jawa Barat melalui Seminar, Studium General, Workshop dan Multimedia	100%	400.000.000	3 <b>Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya pendidikan politik bagi pelajar, mahasiswa, dan generasi muda di Jawa Barat melalui Seminar, Studium General, Workshop dan Multimedia	100%	668.220.000	
	4 Peningkatan Pelayanan/ Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel Dalam Pemilukada	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya partisipasi masyarakat Difabel dalam Pemilukada di Jawa Barat	100%	800.000.000	4 <b>Peningkatan Pelayanan/ Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel Dalam Pemilukada</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya partisipasi masyarakat Difabel dalam Pemilukada di Jawa Barat	100%	588.575.000	
	5 Sosialisasi Pendidikan Politik Melalui Seminar, Studium General, Workshop, dan Multimedia Interaktif di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya pendidikan dan budaya politik di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	100%	1.000.000.000	5 <b>Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya pendidikan dan budaya politik di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	100%	735.600.000	
	6 Penguatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Bagi Generasi Muda	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya sosialisasi nilai dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi generasi	100%	500.000.000	6 <b>Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</b>	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya sosialisasi nilai dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi	100%	376.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			muda di 4 kabupaten di Jawa Barat			<b>Bagi Generasi Muda</b>		generasi muda di 4 kabupaten di Jawa Barat			
	7 Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui rasa cinta budaya daerah Jawa Barat	100%	1.000.000.000	7 <b>Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui rasa cinta budaya daerah Jawa Barat	100%	731.980.000	
	8 Pendidikan Bela Negara Bagi Generasi Muda	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia pada generasi muda Jawa Barat	100%	750.000.000	8 <b>Pendidikan Bela Negara Bagi Generasi Muda</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia pada generasi muda Jawa Barat	100%	702.655.000	
	9 Pemantapan Idiologi Bangsa	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya perilaku masyarakat dan generasi muda yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa	100%	750.000.000	9 <b>Pemantapan Idiologi Bangsa</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya perilaku masyarakat dan generasi muda yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa	100%	419.940.000	
	10 Pemantapan Koordinasi, Konsultasi, Mediasi Infra dan Supra Struktur Politik Dalam Rangka Suksesnya Pemilukada di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya komitmen dan tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak di Jawa Barat	100%	500.000.000						
3	<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>		Tingkat pemantauan kualitas keamanan di daerah	70%		<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>		Tingkat pemantauan kualitas keamanan di daerah	70%	4.345.084.000	
						10 <b>Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat Tahun 2016</b>	Kab/Kota di Jabar	Penurunan tingkat penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat	20%	739.950.000	
	11 Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Tersedianya data yang akurat /valid tentang keberadaan orang asing/imigran gelap di Jawa Barat	100%	750.000.000	11 <b>Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Tersedianya data yang akurat /valid tentang keberadaan orang asing/imigran gelap di Jawa Barat	100%	644.580.000	
	12 Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara 30 Tim Terpadu Provinsi dan 54 Tim Terpadu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat	100%	500.000.000	12 <b>Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara 30 Tim Terpadu Provinsi dan 54 Tim Terpadu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat	100%	447.499.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	13 Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Terbangunnya kemandirian secara kelembagaan, SDM, sarana-prasarana, dan pembiayaan sehingga mampu menunjukkan peran yang optimal dalam pembangunan Jawa Barat	100%	700.000.000	13 <b>Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Terbangunnya kemandirian secara kelembagaan, SDM, sarana-prasarana, dan pembiayaan sehingga mampu menunjukkan peran yang optimal dalam pembangunan Jawa Barat	100%	393.350.000	
	14 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya Kemah Bakti Generasi Muda Lintas Agama sebanyak 4 angkatan yang diikuti oleh 400 orang peserta dan Terselenggaranya Studi Komparatif dalam rangka orientasi Forum Kerukunan Umat Beragama lintas Provinsi	100%	700.000.000	14 <b>Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama</b>	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya Kemah Bakti Generasi Muda Lintas Agama sebanyak 4 angkatan yang diikuti oleh 2 200 orang peserta dan Terselenggaranya Studi Komparatif dalam rangka orientasi Forum Kerukunan Umat Beragama lintas Provinsi	100%	430.400.000	
	15 Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya ketertarikan dan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda Jawa Barat terhadap budaya daerah Jawa Barat untuk menangkal derasnya budaya asing	100%	500.000.000	15 <b>Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya ketertarikan dan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda Jawa Barat terhadap budaya daerah Jawa Barat untuk menangkal derasnya budaya asing	100%	367.225.000	
	16 Penguatan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Menciptakan keharmonisan masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berkembang di daerah melalui keterlibatan 600 orang Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda	100%	1.000.000.000	16 <b>Penguatan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Menciptakan keharmonisan masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berkembang di daerah melalui keterlibatan 600 orang Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda	100%	736.200.000	
	17 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya kewaspadaan dan deteksi dini dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya permasalahan yang berkembang di masyarakat	100%	1.050.000.000	17 <b>Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat</b>	Kab/Kota di Jabar	Meningkatnya kewaspadaan dan deteksi dini dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya permasalahan yang berkembang di masyarakat	100%	585.880.000	
	18 Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat	Kab/Kota di Jabar	Terselenggaranya Semiloka ketahanan ekonomi bagi 400 Orang pengelola ormas, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren dan stakeholders lainnya	100%	500.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur</b>		Terciptanya manajemen Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi dan komprehensif	100%		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur</b>		Terciptanya manajemen Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi dan komprehensif	100%	670.950.000	
	19 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bakesbangpol	Kota Bandung	Terselenggaranya kursus, diklat/jafung, sosialisasi/ seminar, lokakarya, rakor, dan bimbingan teknis bagi aparatur Bakesbangpol	100%	900.000.000	18 <b>Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bakesbangpol</b>	Kota Bandung	Terselenggaranya kursus, diklat/jafung, sosialisasi/ seminar, lokakarya, rakor, dan bimbingan teknis bagi aparatur Bakesbangpol	100%	670.950.000	
5	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelaksanaan Tupoksi Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	12 bln		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelaksanaan Tupoksi Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	12 bln	2.289.196.000	
	20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol	Kota Bandung	Terselenggaranya administrasi perkantoran, jasa komunikasi, listrik, dan air, serta jasa dokumentasi dan publikasi	12 bln	2.926.600.000	19 <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol</b>	Kota Bandung	Terselenggaranya administrasi perkantoran, jasa komunikasi, listrik, dan air, serta jasa dokumentasi dan publikasi	12 bln	2.289.196.000	
6	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100%		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	8.056.392.000	
	21 Pengadaan Barang dan Jasa Bakesbangpol	Kota Bandung	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%	600.000.000	20 <b>Pengadaan Barang dan Jasa Bakesbangpol</b>	Kota Bandung	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%	770.000.000	
	22 Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Jawa Barat	Kota Bandung	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bakesbangpol Prov Jawa Barat	1 Paket	4.773.400.000	21 <b>Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Jawa Barat</b>	Kota Bandung	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bakesbangpol Prov Jawa Barat	1 Paket	7.286.392.000	
7	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bakesbangpol Prov Jawa Barat	100%		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bakesbangpol Prov Jawa Barat	100%	933.508.000	
	23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol	Kota Bandung	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengadaan alat-alat listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM kendaraan dinas, jasa cleaning service, dan keamanan	12 bln	1.100.000.000	22 <b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol</b>	Kota Bandung	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengadaan alat-alat listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM kendaraan dinas, jasa cleaning service, dan keamanan	12 bln	933.508.000	
						<b>Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah</b>			100%	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						23 Operasional Pengelolaan Keuangan Bakesbangpol	Kota Bandung		100%	100.000.000	
8	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	100%		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	100%	101.327.000	
	24 Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Bakesbangpol	Kota Bandung	Terselenggaranya penyusunan RKT, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA, DPA, Renja, Laporan, dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan kegiatan Bakesbangpol Prov. Jabar	100%	100.000.000	24 <b>Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Bakesbangpol</b>	Kota Bandung	Terselenggaranya penyusunan RKT, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA, DPA, Renja, Laporan, dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan kegiatan Bakesbangpol Prov. Jabar	100%	101.327.000	
		<b>Jumlah .....</b>			<b>23.000.000.000</b>					<b>21.607.657.000</b>	

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI telah menetapkan agenda strategis tahun 2016, antara lain yaitu:

1. Optimalisasi pembentukan dan pemberdayaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan pelaksanaan Rencana Aksi
2. Percepatan pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan dan forum-forum bidang kesatuan bangsa dan politik (FKUB,FKDM,FPK & PPWK)
3. Penguatan dukungan data dan informasi bidang Politik dan Pemerintahan Umum
4. Pengembangan sistem deteksi dini penanganan konflik sosial (*early warning system*)
5. Pelaksanaan Pendidikan Politik khususnya bagi Pemilih Pemula, Perempuan, dan Kaum Marjinal
6. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan gangguan pekat (narkotika)
7. Pelaksanaan Dekosentrasi terkait Pelaksanaan urusan PUM dan Forkopimda di 34 provinsi.

Merujuk pada kegiatan-kegiatan yang ada pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. **Kesekretariatan** dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi Badan Kesbangpol serta pemenuhan sarana dan

prasarana Badan Kesbangpol serta penyelenggaraan koordinasi Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota di Jawa Barat.

2. **Idiologi dan Wawasan Kebangsaan** dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan dan pengembangan Idiologi Negara dan Bela Negara serta Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. Kedua hal ini meliputi fasilitasi FKUB, FPK, FKDM, dan sosialisasi Idiologi Negara dan Bela Negara serta Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa bagi masyarakat, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah berkenaan dengan Idiologi Negara dan Bela Negara serta Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
3. **Kewaspadaan Daerah** yang difokuskan pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik daerah di Jawa Barat, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam.
4. **Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan** dengan indikator kinerja diarahkan pada ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
5. **Politik Dalam Negeri** dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan politik, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Jawa Barat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat**

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merujuk pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

#### **1) Tujuan**

- a. Terwujudnya pengamalan masyarakat Jawa Barat terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama, dan kemasyarakatan di Jawa Barat.
- d. Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Jawa Barat yang demokratis, sehat, dan santun.

#### **2) Sasaran**

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara.
- b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif.
- d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat.



### 3.3. Program dan Kegiatan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 menetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"** dan lima misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari kelima misi tersebut, misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah misi ketiga yaitu **"Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik"**.

Untuk mendukung tercapainya visi dan terselenggaranya misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menetapkan visi **"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Demokratis"**, dengan misi :

- Misi Satu : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan idiologi negara dan cinta tanah air.
- Misi Dua : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusivitas di daerah.
- Misi Tiga : Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
- Misi Empat : Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut di atas, untuk tahun 2016 Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat telah menyusun 9 (sembilan) program yang terdiri dari 24 kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
  - 3) Penguatan Peran dan Fungsi Forum-forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat
  - 4) Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se-Jawa Barat.
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Pelajar dan Masyarakat di Jawa Barat
  - 2) Peningkatan Pelayanan/Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel dalam Pemilukada
  - 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Jawa Barat
  - 4) Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Bagi Generasi Muda
  - 5) Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat
  - 6) Pendidikan Bela Negara Bagi Generasi Muda
  - 7) Pemantapan Idiologi Bangsa
3. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan kegiatan :
- 1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat
  - 2) Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat
  - 3) Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat
  - 4) Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat
  - 5) Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama
  - 6) Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat
  - 7) Penguatan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat
  - 8) Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bakesbangpol
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol
  - 2) Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Jawa Barat

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol.
8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan kegiatan Operasional Pengelolaan Keuangan Bakesbangpol.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Bakesbangpol

Pada Tabel 3.1 disajikan rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dengan prakiraan maju tahun 2017. Program dan kegiatan pada tahun 2016 tersebut sesuai dengan program serta kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Hal ini memperlihatkan adanya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara holistik.

**Tabel 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2016					Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Common Goals	Tematik Sektoral	Tematik Kewilayahan	Mitra OPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)
	<b>URUSAN WAJIB</b>												
	<b>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>												
	<b>Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah</b>	Terselenggaranya perencanaan Bakesbangpol yang komprehensif, sistematis, dan akurat		100%	887.430.000							100%	950.000.000
	01 Penguatan Peran dan Fungsi Forum-forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antara Bakesbangpol Prov. Jawa Barat dengan Forum-forum Mitra Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat melalui penyelenggaraan 4 kali Rakor	Kab/Kota di Jawa Barat	100%	369.200.000	-	-	-	-	-	-	100%	400.000.000
	02 Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se-Jawa Barat	Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang Kesbangpol se-Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa Barat	100%	518.230.000	-	-	-	-	-	-	100%	550.000.000
	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu atau Pemilukada		72%	4.223.770.000							72%	4.475.000.000
	03 Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat	Terselenggaranya pendidik-an politik bagi pelajar, mahasiswa, dan generasi muda di Jawa	Kab/Kota di Jawa Barat	100%	668.220.000	-	-	-	-	-	-	100%	675.000.000





Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2016			Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya					
					angkatan yang diikuti oleh 400 orang peserta dan Terselenggaranya Studi Komparatif dalam rangka orientasi Forum Kerukunan Umat Beragama lintas Provinsi										
			15	Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat	Meningkatnya ketertarikan dan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda Jawa Barat terhadap budaya daerah Jawa Barat untuk menangkal derasnya budaya asing	Kab/Kota di Jawa Barat	100%	367.225.000	-	-	-	-	-	100%	400.000.000
			16	Penguatan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat	Menciptakan keharmonisan masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berkembang di daerah melalui keterlibatan 600 orang Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda	Kab/Kota di Jawa Barat	100%	736.200.000	-	-	-	-	-	100%	800.000.000
			17	Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat	Meningkatnya kewaspadaan dan deteksi dini dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya permasalahan yang berkembang di masyarakat	Kab/Kota di Jawa Barat	100%	585.880.000	-	-	-	-	-	100%	650.000.000
			Program Peningkatan		Terciptanya manajemen		100%	670.950.000						100%	750.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2016				Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Common Goals	Tematik Sektoral	Tematik Kewilayahan			Mitra OPD
				Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi dan komprehensif											
				18 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bakesbangpol	Terselenggaranya kursus, diklat/jafung, sosialisasi/ seminar, lokakarya, rakor, dan bimbingan teknis bagi aparatur Bakesbangpol	Kota Bandung	100%	670.950.000	-	-	-	-	-	-	100%	750.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelaksanaan Tupoksi Bakesbangpol Prov. Jawa Barat		12 bln	2.289.196.000								2.500.000.000
				19 Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol	Terselenggaranya administrasi perkantoran, jasa komunikasi, listrik, dan air, serta jasa dokumentasi dan publikasi	Kota Bandung	12 bln	2.289.196.000	-	-	-	-	-	-	12 bln	2.500.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi		100%	8.056.392.000							100%	850.000.000
				20 Pengadaan Barang dan Jasa Bakesbangpol	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kota Bandung	100%	770.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	850.000.000
				21 Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Jawa Barat	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bakesbangpol Prov Jawa Barat	Kota Bandung	100%	7.286.392.000	-	-	-	-	-	-	100%	-
				Program Pemeliharaan Sarana	Terpeliharanya sarana dan		100%	933.508.000							100%	1.000.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2016				Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya						
				dan Prasarana Aparatur	prasarana kantor Ba-kesbangpol Prov Jawa Barat											
				22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol	Terselenggaranya pemeli-haraan sarana dan pra-sarana kantor, pengadaan alat-alat listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM kend. dinas, jasa cleaning service, dan keamanan	Kota Bandung	12 bln	933.508.000	-	-	-	-	-	12 bln	1.000.000.000	
				Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah			100%	100.000.000						100%	120.000.000	
				23 Operasional Pengelolaan Keuangan Bakesbangpol		Kota Bandung	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	100%	120.000.000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggar-an, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bakesbang-pol Prov. Jawa Barat		100%	101.327.000						100%	120.000.000	
				24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol	Terselenggaranya penyusunan RKT, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA, DPA, Renja, Laporan, dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan kegiatan Bakesbangpol Prov. Jabar	Kota Bandung	100%	101.327.000	-	-	-	-	-	100%	120.000.000	
Jumlah.....							21.607.657.000								15.565.000.000	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 merupakan dokumen rencana tahunan yang didalamnya termuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Di dalam RENJA ini juga disampaikan indikator kinerja setiap program dan kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2016 sebagai salah satu tolok ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Penetapan program dan kegiatan pada RENJA ini telah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat hendaknya berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini. Selain itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik se-Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun nonformal dengan para stakeholders. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan manfaat yang

dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Bandung, Januari 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. AGUS HANAFI, BBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591212 1981021 001